

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Provinsi Jambi)

Ratih Rosita*, Asrini

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi

*Correspondence email: ratihrosita11@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi baik secara simultan maupun terpisah terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi Jambi. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah - Dinas yang berjumlah sebanyak 18 dinas di Provinsi Jambi. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu meliputi Kepala OPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD, dan Bendahara OPD, sehingga total responden adalah 54 orang. Teknik pengumpulan data penelitian dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Jambi. Secara parsial variabel transparansi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah, sementara variabel akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: akuntabilitas; transparansi; komitmen organisasi; kinerja pemerintah daerah

***Abstract.** This study aims to examine the effect of accountability, transparency, and organizational commitment both simultaneously and separately on the performance of local governments in the regional apparatus organization (OPD) of Jambi province. The population in this study was the Regional Apparatus Organization - Service, totaling 18 offices in Jambi Province. The sample chosen in this study consisted of 3 (three) people, including the OPD Head, OPD Financial Administration Officer, and OPD Treasurer, so that the total number of respondents was 54 people. Research data collection techniques by distributing questionnaires to research respondents. While the data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. The results of the study found that simultaneously accountability, transparency, and organizational commitment had an effect on the performance of local governments in the regional apparatus organization (OPD) of Jambi Province. Partially the variables of transparency and organizational commitment have an effect on local government performance, while the accountability variable has no effect on local government performance.*

Keywords: *accountability; transparency; organizational commitment; local government performance*

Pendahuluan

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Mahsun (2016) mengatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kegagalan dalam pencapaian kinerja menjadi satu ukuran untuk melakukan perbaikan pada masa yang akan datang. Sementara keberhasilan atas kinerja membutuhkan suatu penghargaan untuk dapat meningkatkan produktivitas serta untuk mendapatkan dukungan publik terhadap pemerintah.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pengukuran kinerja OPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) setiap tahun melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja yang dinilai akan diberikan peringkat secara nasional, skor, dan status kinerja.

Tabel 1
Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi selama Tahun 2010 – 2017

No	Pemerintah Daerah	Tahun	Peringkat Nasional	Skor	Status
1	Provinsi Jambi	2010	33	1,3106	Sedang
2	Provinsi Jambi	2011	14	2,4166	Tinggi

3	Provinsi Jambi	2012	17	2,2188	Tinggi
4	Provinsi Jambi	2013	17	2,3222	Tinggi
5	Provinsi Jambi	2014	15	2,4875	Tinggi
6	Provinsi Jambi	2015	18	2,6367	Tinggi
7	Provinsi Jambi	2016	15	2,8404	Tinggi
8	Provinsi Jambi	2017	33	1,7026	Sedang

Sumber: OTDA Kemendagri

Tabel 1 menunjukkan tren peningkatan kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berada di peringkat paling bawah karena menempati urutan 33 dari 33 provinsi dengan skor kinerja 1,3106 dan status sedang. Namun, selama enam tahun berikutnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi mampu terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi berhasil meningkatkan skor kinerja hingga mencapai 2,8404 dengan status Tinggi. Pada tahun 2017, terlihat bahwa kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi kembali menurun dari tahun-tahun sebelumnya karena menempati urutan 33 dari 33 provinsi dengan skor kinerja 1,7026 dengan status sedang.

Penurunan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2017 disebabkan oleh menurunnya tingkat kemandirian daerah dari segi pendapatan daerah. Selain itu, penurunan kinerja dapat juga disebabkan menurunnya tingkat akuntabilitas pemda. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah bahwa bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi harus berfokus pada peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja yang terukur. Upaya-upaya pembenahan telah diupayakan salah satunya dengan cara melakukan pendampingan dalam penyusunan komponen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) perangkat daerah mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan pelaporan kinerja. Kinerja pemerintah daerah yang sedang/tinggi/sangat tinggi, tentu dipengaruhi oleh banyak faktor. Berbagai penelitian terdahulu telah dilakukan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, antara lain akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi. Faktor pertama, akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu) bertanggung jawab. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal (Mahsun, 2016).

Faktor kedua adalah transparansi. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Faktor ketiga adalah komitmen organisasi. Menurut Anurti (2013) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian Auditya dan Lismawati (2013) yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. Ada beberapa perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang direplikasi. Pertama, penelitian Auditya dan Lismawati (2013) menggunakan dua variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah, yaitu akuntabilitas dan transparansi. Alasan penambahan variabel komitmen organisasi didasarkan pada penelitian Anurti (2013) dimana tinggi rendahnya komitmen organisasi akan sangat menentukan kinerja yang akan dicapai oleh organisasi, komitmen dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Kedua, penelitian Auditya dan Lismawati (2013) menggunakan subjek penelitian di OPD Provinsi Bengkulu, sedangkan penelitian ini menggunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas di Provinsi Jambi. Ketiga, penelitian Auditya dan Lismawati (2013) dilakukan pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas di Provinsi Jambi.

Landasan Teori dan Hipotesis *Akuntabilitas*

Mardiasmo (2013) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban memper-

tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Auditya dan Lismawati, 2013). Umar, Syawalina, dan Khairunnisa (2018) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi juga terdapat dalam PP. Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan.

Komitmen Organisasi

Menurut Anurti (2013) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti memihak seseorang pada pekerjaannya yang khusus dan komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak pada organisasi yang mempekerjakannya. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan sendiri (Azizah, 2012).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan standar, sasaran, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja dapat dijelaskan sebagai suatu kajian tentang kemampuan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Penilaian kinerja dapat dipakai untuk mengukur kegiatan-kegiatan organisasi dalam pencapaian tujuan dan juga sebagai bahan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Metode

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen (Saputra, Darwanis dan Abdullah, 2014). Subjek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas di Provinsi Jambi. Jenis data penelitian ini adalah data primer. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan pada instansi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas yang berjumlah sebanyak 18 Dinas di Provinsi Jambi. Sampel adalah bagian dari populasi (Indriantoro dan Supomo, 2018). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sampel jenuh. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala OPD Dinas, Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD Dinas, dan Bendahara OPD Dinas (Yuliani, 2014).

Variabel Bebas (Independen)

1. Akuntabilitas. Mardiasmo (2013) mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Instrumen yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas diadopsi dari penelitian Nurachman (2016). Instrumen yang digunakan terdiri dari 22 item pernyataan yang diukur dengan skala *likert*.
2. Transparansi. Andrianto (2007) transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Instrumen yang digunakan untuk mengukur transparansi diadopsi dari penelitian Krisherdian (2015). Instrumen yang digunakan terdiri dari 12 item pernyataan yang diukur dengan skala *likert*.
3. Komitmen Organisasi. Menurut Anurti (2013) komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Instrumen yang digunakan terdiri dari 24 item pernyataan yang diukur dengan skala *likert*.

Variabel Terikat (Dependen)

Kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja Pemerintah Daerah diadopsi dari penelitian Yuliani (2014). Instrumen yang digunakan terdiri dari 7 item pernyataan yang diukur dengan skala *likert*.

Tabel 2
Definisi Operasionalisasi Variabel

Jenis Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Item Pertanyaan
Akuntabilitas (X1) (Nurachman, 2018)	Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.	Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas kejujuran. Akuntabilitas program. Akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas financial/keuangan. yang membutuhkan.	Interval	1-5 6-9 10-15 16-18 19-22
Transparansi (X2) (Krisherdian, 2015)	Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya padaperaturan perundang-undangan.	Keterbukaan. Aksesabilitas. Publikasi.	Interval	1-3 4-5 6-10
Komitmen Organisasi (X3) (Cancoyo, 2008)	Komitmen organisasi adalah suatu tingkat keyakinan seorang karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu yang tujuannya berniat memelihara/mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Jadi keterlibatan kerja yang tinggi berarti pemihakan seseorang pada pekerjaannya yang khusus dan komimen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada organisasi yang mempekerjakannya.	Effective commitment. Continuance commitment. Normative commitment.	Interval	1-8 9-16 17-24
Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Yuliani (2014)	Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.	Pengelolaan anggaran. Alokasi biaya (ekonomis dan efisien). Kualitas pelayanan (efektivitas).	Interval	1-6 7-10 11

Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbentuk *likert*, data yang diperoleh adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 poin (Sekaran, 2014). Skala yang berisi lima tingkat prefensi jawaban dengan pemilihan sebagai berikut: Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju (STS); Skor 2 untuk jawaban tidak setuju (TS); Skor 3 untuk jawaban netral (N); Skor 4 untuk jawaban setuju (S); dan Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (SS).

Penelitian ini dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. (Indriantoro dan Supomo, 2014). Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Tujuan utama uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen apabila instrumen tersebut digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Indriantoro dan Supomo, 2014). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen (Akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi) terhadap variabel dependen (Kinerja pemerintah daerah). Pengolahan data dengan persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Keterangan : Y = Kinerja Pemerintah Daerah; α = Konstanta; $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi; X1 = Akuntabilitas
X2 = Transparansi; X3 = Komitmen Organisasi

Uji F menunjukkan apakah variabel bebas secara keseluruhan atau bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas (Ghozali, 2014). Sedangkan uji t dimaksudkan untuk melihat apakah variabel secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2014). Koefisien determinasi/R² digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2016). Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap dependen.

Hasil

Tabel 3
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas	49	3.6	5.0	4.228	.4555
Transparansi	49	3.5	4.8	4.194	.3442
Komitmen Organisasi	49	3.7	5.0	4.338	.4356
Kinerja Pemerintah Daerah	49	3.5	5.0	4.219	.3491
Valid N (listwise)	49				

Sumber: data olahan

Tabel 3 jumlah responden penelitian sebanyak 49 orang. Variabel Akuntabilitas (X_1) memiliki nilai minimum 3,60 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Akuntabilitas (X_1) sebesar 4,228 dengan standar deviasi sebesar 0,4555. Variabel Transparansi (X_2) memiliki nilai minimum 3,50 dan nilai maksimum 4,80. Nilai rata-rata Transparansi (X_2) sebesar 4,194 dengan standar deviasi sebesar 0,3442. Variabel Komitmen Organisasi (X_3) memiliki nilai minimum 3,70 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Komitmen Organisasi (X_3) sebesar 4,338 dengan standar deviasi sebesar 0,4356. Variabel Kinerja Manajerial (Y) memiliki nilai minimum 3,50 dan nilai maksimum 5,00. Nilai rata-rata Kinerja Manajerial (Y) sebesar 4,219 dengan standar deviasi sebesar 0,3491.

Pengujian validitas seluruh item pernyataan yang diajukan pada kuisioner telah valid dimana r hitung $>$ r tabel ($df\ 49-2 = 47, 5\%, 0,2816$). Pembuktian ini menunjukkan bahwa semua pertanyaan layak digunakan sebagai indikator dari variabel. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran keandalan untuk masing-masing variabel bebas dan variabel terikat memenuhi persyaratan $\alpha > 0.70$.berikut disajikan hasil pengujian reliabilitas.

Tabel 4
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas	0,948
Transparansi	0,713
Komitmen Organisasi	0,966
Kinerja Pemerintah Daerah	0,769

Sumber: data olahan

Pengukuran yang digunakan adalah dengan menggunakan *alpha cronchbach*, yaitu apabila *cronchbach alpha* lebih besar dari 0,7 atau 70 %, maka item pertanyaan tersebut adalah reliabel. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui bahwa akuntabilitas, transparansi, komitmen organisasi, dan kinerja pemerintah daerah adalah reliable karena memiliki nilai di atas 0,70 sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel – variabel penelitian memiliki reliabilitas atau ketepatan yang tinggi untuk dijadikan variabel (konstruk) pada suatu penelitian.



Sumber: data olahan

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data

Gambar 1 di atas menunjukkan data tersebar di sepanjang garis diagonal, maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

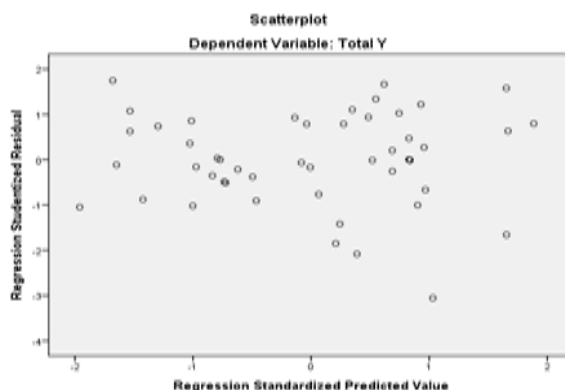
Tabel 5

Hasil Pengujian Asumsi Multikolinieritas Untuk Pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Akuntabilitas (X_1)	.902	1.109
	Transparansi (X_2)	.809	1.237
	Komitmen Organisasi (X_3)	.845	1.184

Sumber: data olahan

Nilai Tolerance pada Tabel 5 menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara sesama variabel independen untuk pengaruh X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap Y , dimana nilai Tolerance masing-masing variabel bebas masih lebih besar dari 0,1, yaitu $X_1 = 0,902$, $X_2 = 0,809$, dan $X_3 = 0,845$ dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen. Nilai VIF masing-masing variabel bebas juga masih lebih kecil dari 10, yaitu $X_1 = 1,109$, $X_2 = 1,237$, dan $X_3 = 1,184$ dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen



Sumber: data olahan

Gambar 2

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 2 menunjukkan bahwa titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y , sehingga data tidak terdeteksi terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 6
Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4.083	4.831			.845	.402
Total X1	.015	.035	.038		.416	.679
Total X2	.755	.107	.677		7.035	.000
Total X3	.089	.035	.243		2.582	.013

Sumber: data olahan

Model dalam penelitian ini adalah $Y = 4,083 + 0,015X_1 + 0,755X_2 + 0,089X_3$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan:

1. Konstanta sebesar 4,083. Artinya jika variable akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi sama dengan nol, maka kinerja pemerintah daerah (Y) bernilai sebesar 4,083.
2. Koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,015. Artinya, jika akuntabilitas mengalami kenaikan 1%, maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,015.
3. Koefisien regresi untuk variabel transparansi sebesar 0,0755. Artinya, jika transparansi mengalami kenaikan 1%, maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,0755.
4. Koefisien regresi untuk variabel komitmen organisasi sebesar 0,089. Artinya, jika komitmen organisasi mengalami kenaikan 1%, maka kinerja pemerintah daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,089.

Tabel 7
Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	469.214	3	156.405	29.495	.000 ^b
	Residual	238.623	45	5.303		
	Total	707.837	48			

Sumber: data olahan

Tabel 7 hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara simultan) diperoleh hasil, yaitu bahwa Fhitung sebesar 29,495 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi. Tabel 6 menjelaskan hasil analisis regresi linear berganda (dalam hal ini untuk menguji pengaruh secara parsial) diperoleh hasil yang dapat dinyatakan berikut:

1. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t 0,416 dan signifikansi $0,679 > 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_0 diterima, yang berarti secara parsial variabel akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi.
2. Variabel transparansi (X2) memiliki nilai t 7,035 dan signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi.
3. Variabel komitmen organisasi (X3) memiliki nilai t 2,582 dan signifikansi $0,013 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti secara parsial variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.814 ^a	.663	.640	2.3028

Sumber: data olahan

Tabel 8 diketahui *adjusted R square* yang diperoleh adalah sebesar 0,640. Hal ini berarti bahwa 64,0% kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi sedangkan selebihnya 36,0% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti partisipasi penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran, karakteristik tujuan anggaran,

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi secara simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Kinerja pemerintah daerah Provinsi Jambi sebesar 64% dipengaruhi oleh variabel akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi. Besarnya pengaruh ini masuk dalam kategori cukup kuat (41%-70%).

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Hal ini menjelaskan Akuntabilitas aparatur di OPD di Provinsi Jambi masih belum cukup baik sehingga belum dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Data penelitian yang terkumpul dari 49 responden menunjukkan bahwa akuntabilitas masih terdapat kelemahan, terutama dalam hal akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial menjadi dimensi akuntabilitas yang mendapatkan skor paling rendah diantara dimensi akuntabilitas lainnya. Terdapat 29 responden atau 59% yang menyatakan bahwa OPD Dinas mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh proses penyusunan laporan kinerja dengan baik, sedangkan 20 responden lainnya atau 41% menyatakan bahwa OPD Dinas belum mampu mempertanggungjawabkan atas seluruh proses penyusunan laporan kinerja dengan baik. Terdapat 7 responden atau 14% yang menyatakan bahwa OPD Dinas belum mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan organisasinya secara efektif dan efisien. Terdapat 22 responden atau 45% yang menyatakan bahwa OPD Dinas belum mampu menghindari apabila terjadi penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Kondisi ini menjelaskan bahwa masih adanya penggunaan kekuasaan jabatan untuk hal-hal tertentu yang menguntungkan sebagian pihak dan merugikan pihak lain. Terdapat 17 responden atau 24% yang menyatakan bahwa OPD Dinas belum mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dalam pelaksanaan program. Kondisi

ini menjelaskan bahwa pelaksanaan program di OPD Dinas telah dilakukan namun terdapat kendala dalam hal pertanggungjawaban kegiatan/program yang dilaksanakan, sehingga mengurangi tingkat penerapan akuntabilitas.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Semakin baik transparansi maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah. Variabel transparansi terdiri dari tiga indikator, yaitu keterbukaan, aksesibilitas, dan publikasi. Data penelitian terkait keterbukaan informasi menunjukkan bahwa responden sebanyak 40 orang atau 82% menyatakan bahwa media yang digunakan oleh pemerintah dalam mempublikasikan informasi terkait kinerja Pemda sudah efektif. Data penelitian terkait aksesibilitas menunjukkan bahwa responden sebanyak 44 orang atau 90% menyatakan bahwa publik merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran. Dan data penelitian terkait publikasi menunjukkan bahwa responden sebanyak 37 orang atau 76% menyatakan bahwa APBD disajikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi. Semakin baik komitmen organisasi maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah. Variabel komitmen organisasi terdiri dari tiga indikator, yaitu *effective commitment* (komitmen efektif), *continuance commitment* (komitmen kelanjutan), dan *normative commitment* (komitmen normatif). Data penelitian terkait *effective commitment* (komitmen efektif) menunjukkan bahwa responden sebanyak 45 orang atau 92% menyatakan organisasi ini memiliki arti yang sangat besar bagi responden. Data penelitian terkait *continuance commitment* (komitmen kelanjutan) menunjukkan bahwa responden sebanyak 48 orang atau 98% menyatakan bahwa saat ini tetap bekerja di organisasi merupakan kebutuhan sekaligus juga keinginan responden. Dan data penelitian terkait *normative commitment* (komitmen normatif) menunjukkan bahwa responden sebanyak 48 orang atau 98% menyatakan salah satu alasan utama untuk melanjutkan bekerja pada organisasi ini adalah bahwa responden percaya loyalitas adalah penting dan oleh sebab itu responden merasa tetap bekerja di Dinas merupakan kewajiban moral.

Simpulan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa:

1. Akuntabilitas, transparansi, dan komitmen organisasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
2. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kinerja Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
3. Transparansi berpengaruh terhadap Kinerja Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
4. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap Kinerja pemerintah daerah di Provinsi Jambi.

Daftar Pustaka

- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing: Malang.
- Anurti, Sri Welmi. 2013. Pengaruh Peran Manajer Pengelolaan Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja SKPD. 1(1).
- Auditya, Lucy, Lismawati, Husaini. 2013. Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*.3(1). ISSN 2303-0348.
- Azizah, Nurul. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasional, Peran Manajer, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Manajerial.
- Cancoyo, Irenne Happy. 2008. Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Manajerial. Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Soegijapranata: Semarang.
- Ghozali, Imam & Anis Chariri. 2014. *Teori Akuntansi: International Financial Reporting System (IFRS)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. BPFE Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. ANDI & BPFE: Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. ANDI & BPFE: Yogyakarta.
- Krisherdian, Ridho Agung Gigih. 2015. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah. *Artikel Ekonomi dan Bisnis*.
- Mahsun, Muhammad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta: Jakarta.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1), 2-4.

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik, *Makalah yang disampaikan dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES)*. No. 12, Makasar 21-23 April 2000 248-265
- Nurachman, Dwi Aditya. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan: Bandung.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007. Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- Saputra, Devi Satria; Darwanis; & Syukriy Abdullah. 2014. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 3(2)
- Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Buku 1. Edisi 4. Salemba Empat: Jakarta.
- Umar, Zulkifli; Syawalina, Cut Fittika, & Khairunnisa. 2018. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Inspektorat. 6(2)
- Yuliani, Nur Laila. 2014. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Daerah. 5(2).